



Upah Jauh dari Layak, MPBI: Buruh DIY Defisit Ekonomi

YOGYA, TRIBUN - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menyebut upah pekerja/buruh saat ini masih jauh dari mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Hal itu didasarkan atas hasil survei angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh MPBI DIY pada Oktober 2024.

Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian pekerja/buruh berada dalam posisi defisit ekonomi. "Upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral (UMS) yang baru ditetapkan untuk tahun 2025 masih lebih rendah dari KHL tahun 2024, yaitu

di kisaran Rp3,7 juta hingga Rp4 juta. Dengan situasi ini, buruh harus menghadapi kenyataan bahwa pengeluaran mereka lebih besar dibandingkan pendapatan," ujarnya, Kamis (26/12).

Situasi ini diprediksi akan semakin memburuk dengan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai tahun depan. Menurut Irsad, kenaikan PPN akan berimbas langsung kepada kenaikan harga barang dan jasa, yang akhirnya menekan daya beli keluarga buruh.

"Hal ini bisa menurunkan permintaan barang dan jasa, sehingga berpotensi mem-

perlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek," tambahnya.

Selain itu, pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji maksimal Rp10 juta per bulan juga dinilai diskriminatif, karena tidak mencakup semua pekerja di berbagai sektor dan berpotensi menimbulkan ketimpangan. Namun, Irsad mengakui kebijakan itu akan memberikan dampak positif bagi perekonomian keluarga buruh yang menerima manfaatnya.

MPBI DIY mengajukan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, mem-

batalkan kenaikan PPN 12 persen karena berpotensi menekan daya beli masyarakat secara signifikan. Kedua, menerapkan pembebasan PPh untuk pekerja di semua sektor tanpa diskriminasi. Ketiga, merevisi UMP, UMK, dan UMSP agar sesuai dengan KHL, kisaran Rp3,7 juta-4 juta.

MPBI DIY juga menekankan pentingnya memperluas akses terhadap jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya, serta memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga buruh sebagai kompensasi atas tekanan ekonomi yang semakin meningkat. (han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005